

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Momentum Kebangkitan Nasional ditandai dengan munculnya kesadaran kolektif di antara komponen bangsa yang mewakili berbagai kelompok dengan berbagai latar belakang, baik etnis maupun profesi, terbentuk dalam pergerakan secara nasional untuk mewujudkan kemerdekaan¹. Kebangkitan Nasional Indonesia terjadi pada 20 Mei 1908 dengan lahirnya organisasi Boedi Oetomo, namun sebelumnya masyarakat Tionghoa di Indonesia sudah lebih dulu mengalami momen tersebut. Kebangkitan nasionalisme budaya tionghoa di tandai dengan penerbitan kesustraan Tionghoa dalam bahasa Melayu peranakan, yang kemudian lebih jauh dimanifestasikan dalam kemunculan Tiong Hoa Hwe Koan dalam peralihan masuk abad ke-20².

Sejak dulu etnis Tionghoa dijadikan sebagai “perantara” karena sumber daya manusianya yang memumpuni. Pada masa prakolonial, etnis Tionghoa sudah bekerja kepada raja-raja sebagai penarik pajak gerbang tol yang efektif. Dikatakan efektif sebab jumlah pajak yang disetorkan oleh orang Tionghoa lebih banyak tiga kali lipat dibanding jumlah pajak yang disetorkan oleh penarik pajak dari orang

¹Arsip Nasional Republik Indonesia, “*Jejak Kebangkitan Nasional*”, dalam Artikel Arsip Nasional Edisi 63/Januari-Juni/2014 (Jakarta: Media Kearsipan Nasional, hlm. 4.

² Leo Suryadinata, “*Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*”, Terj. Nur Iman Subono (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005) hlm. 3.

pribumi. Etnis Tionghoa sebagai perantara juga dimanfaatkan oleh Belanda untuk menghubungkan mereka dengan golongan pribumi. Kedudukan sebagai perantara ini tidak hanya sekedar untuk menghubungkan Belanda dengan golongan pribumi melainkan menjadikan Tionghoa sebagai “perisai” atau “kambing hitam” di saat terjadi kerusuhan menentang penguasa atau saat terjadi kevakuman pemerintahan³. Hal tersebut diwujudkan dengan cara memberikan *pacht* atau hak pengelolaan kepada etnis Tionghoa yang kemudian dengan kedudukannya itu mereka memeras rakyat dan menjadi sangat kaya. Akhirnya, golongan Tionghoa diposisikan menjadi minoritas perantara yang kedudukan ekonominya cukup mapan, tetapi secara politis dibenci oleh rakyat⁴. Sebagai golongan perantara, etnis Tionghoa sadar betul atas ketidakberdayaannya secara politis sehingga rentan diserang oleh kelompok lain di luar etnisnya bahkan kelompok etnisnya sendiri. Hal ini membuat mereka harus memohon perlindungan kepada kelompok dominan yang masih memerlukan peran ekonomi mereka sehingga dengan mudah orang menuding mereka sebagai “oportunis”. Salah satu akibat dari kondisi ini adalah munculnya stereotip yang menyatakan bahwa etnis Tionghoa adalah orang asing atau bukan termasuk pribumi, sehingga rasa nasionalismenya terhadap tanah air harus dipertanyakan. Dengan loyalitas yang sulit untuk diharapkan dari golongan perantara ini mengakibatkan terjadi beberapa kerusuhan anti-Tionghoa dengan berbagai alasan, bahkan hingga di masa modern ini.

³ Peter Carey, “Orang Cina, Bandar Tol, Candu, & Perang Jawa” (Depok: Komunitas Bambu, 2008) hlm. Vii.

⁴ *Ibid.*

Nasionalisme di kalangan Tionghoa muncul peralihan abad ke-20. Nasionalisme yang dimaksud ialah perasaan sebagai bagian dari negara Cina yang kemudian mengacu kepada keinginan untuk mempersatukan seluruh masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda sebagai suatu masyarakat yang kuat dan yang aspirasinya didengar oleh pemerintah kolonial⁵. Hal tersebut timbul akibat dari pemikiran revolusioner Sun Yat-Sen mengenai nasionalisme dan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan Qing di Cina. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kaum Cina perantauan memiliki peranan penting dalam melakukan aktivitasnya serta menjalin hubungan baik dengan mereka. Sejak saat itu, muncullah minat terhadap konfusianisme, sejarah Cina, kebudayaannya, hingga perkembangan dari negara Cina itu sendiri.

Tiong Hoa Hwee Koan atau yang disingkat THHK merupakan pionir perkumpulan modern bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada 17 Maret 1900 di Batavia dengan tujuan untuk menghidupkan kembali Konfusianisme serta memajukan nasib orang-orang Tionghoa di Indonesia. Selain itu, THHK juga bertujuan untuk menggalang persatuan orang-orang Tionghoa perantauan tanpa membeda-bedakan asal daerah baik totok maupun peranakan⁶. Tidak hanya dalam bidang sosial-budaya, THHK juga memegang peranan penting dalam sejarah pendidikan dan perkembangan etnis Tionghoa dengan mendirikan sekolah dengan model pendidikan modern pertama pada dekade tahun 1900-an.

⁵ A Dahana, "*Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia*" Jurnal Wacana, Vol. 2, No. 1, hlm. 63.

⁶ Benny G. Setiono, "*Tionghoa dalam Pusaran Politik*" (Jakarta: Elkasa, 2009), hlm. 260

Sistem pendidikan modern yang diadopsi oleh sekolah THHK kemudian menginspirasi kemunculan pendidikan modern di Indonesia.

Tiong Hoa Hwee Koan sebagai salah satu organisasi Cina Raya (Pan-Cina) memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Tionghoa pada awal abad ke-20. Pembentukan THHK diikuti dengan terbitnya surat-surat kabar Tionghoa peranakan dalam Bahasa melayu Tionghoa, seperti Li Po di Sukabumi pada tahun 1909. Setelah kemunculan THHK dan surat kabar tersebut mendorong lebih lanjut rasa nasionalisme serta memperkuat perkembangan Gerakan Cina Raya, yaitu mempersatukan orang Tionghoa Hindia Belanda dan sekaligus mengarahkan orientasi kultural dan politiknya ke negeri Cina⁷.

Bangkitnya Nasionalisme Tionghoa ini merupakan fenomena besar yang pernah terjadi di Indonesia, oleh sebab itu banyak peneliti yang membahas mengenai organisasi ini dalam tulisan mereka, seperti artikel yang ditulis oleh Wildan Sena Utami yang berjudul Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Tionghoa di Batavia 1900-an-1930-an. Dalam tulisannya Wildan membahas adanya beberapa perubahan budaya pada Tionghoa peranakan yang mana beberapa diantaranya disebabkan karena mereka bersekolah di sekolah THHK. Kemudian, terdapat artikel yang ditulis oleh Sugiyarto (2013) dengan judul Komunitas Tionghoa dalam Pergerakan Politik Indonesia 1926-1942 yang berisi tentang dinamika politik masyarakat Tionghoa hingga akhirnya terbagi menjadi tiga kubu dengan orientasi yang berbeda serta membahas sekilas tentang THHK

⁷ Sugiyarto, Komunitas Tionghoa dalam Pergerakan Politik Indonesia (1926-1942) (Fakultas Ilmu Budaya Undip, 2013), hlm. 5.

yang berperan mengarahkan orientasi kultural dan politik ke negeri Cina. Ada pula artikel berjudul Kegiatan Awal masyarakat Tionghoa di Indonesia oleh Dahana yang juga membahas secara sekilas mengenai pendirian sekolah THHK merupakan bentuk pergerakan akan abainya pemerintah kolonial terhadap pendidikan masyarakat Tionghoa.

Menurut Dahana (2000), perlakuan pemerintah Hindia Belanda dan munculnya Nasionalisme Cina di Daratan Cina sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di kalangan mereka. Pada 1902, terdapat gagasan pembentukan kamar dagang dari pemerintahan kekaisaran Cina sehingga beberapa pedagang terkemuka Tionghoa di Hindia Belanda juga membentuk kamar dagang di beberapa kota besar yang di beri nama Hwa Siang Hwee yang berarti “Asosiasi Pedagangan Cina”. Organisasi ini berfungsi sebagai menyatukan beragam aktivitas bisnis dan perdagangan serta media untuk memecahkan masalah bisnis di kalangan para pedagang Tionghoa. Dibentuk atas dasar karakter nasionalisme Cina hingga pada perkembangannya organisasi ini menjadi tulang punggung bagi berbagai aktivitas komunitas Cina di Hindia Belanda, salah satunya THHK.

Dalam bidang Pendidikan, THHK mendirikan sekolah bagi masyarakat Tionghoa meskipun pada awalnya fokus utama THHK bukan pada bidang pendidikan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh abainya pemerintah kolonial terhadap pendidikan bagi masyarakat Tionghoa, hingga dengan dimasukkannya Bahasa Inggris dalam kurikulum THHK membuat pemerintah Belanda akhirnya menyadari pentingnya pendidikan bagi orang-orang Tionghoa. Aktivitas politik

Cina dimulai oleh Sun Yat-Sen yang menyebarkan nasionalisme Cina di setiap komunitas Tionghoa yang tinggal di luar negeri. Buku-buku dan selebaran menjadi media yang efektif dalam menyebarkan pemikiran revolusionernya, namun pada saat itu masyarakat Tionghoa yang tinggal di luar negeri sebagian besar merupakan masyarakat miskin sehingga tidak mampu membeli bahan bacaan. Maka dibentuklah perkumpulan yang dinamakan Kamar Baca (*Soe Po Sin*). *Soe Po Sin* bertujuan untuk mempropagandakan kesadaran masyarakat Tionghoa untuk mencintai Cina dan memupuk perasaan bangga menjadi orang Cina. Dengan aktivitas itu, orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda semakin bersatu dan kesadaran nasional mereka juga semakin kuat. Setelah melihat orang-orang Tionghoa dalam melakukan Gerakan nasionalisnya membuat Biro Urusan Cina menyarankan pemerintah kolonial untuk memperlunak sikapnya terhadap komunitas Cina di Hindia Belanda⁸. Dengan segala perkembangan itu ketika kesadaran nasionalisme Indonesia muncul, masyarakat Tionghoa tidak banyak terpengaruh, dan sebagian besar golongan etnik Tionghoa kurang tertarik terhadapnya⁹.

Nasionalisme Tionghoa penting untuk dibahas sebab memiliki hubungan dengan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Tionghoa yang dimaksud adalah nasionalisme yang sedang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Tionghoa di wilayah pemerintahan kolonial Belanda, yaitu Hindia Belanda. Hubungan ini didasarkan pada sejarah bersama Barat, di mana keduanya

⁸ A Dahana, "Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia" Jurnal Wacana, Vol. 2, No. 1 (April, 2000), hlm. 61-65

⁹ *Ibid*, hlm. 54

mengalami penderitaan yang sama di bawah kolonialisme Belanda. Dengan diberlakukannya pertanian wajib, pajak tinggi dan berbagai peraturan represif lainnya, mereka (orang Indonesia dan Cina) mulai bertanya-tanya mengapa mereka harus menderita. Keduanya melihat kolonialisme dan imperialisme sebagai musuh bersama, sehingga tidak saling bertentangan atau mendukung satu sama lain.

Sekian banyak yang menulis mengenai THHK, tidak banyak penulis yang memberikan fokus utuh terhadap peran organisasi tersebut di Hindia Belanda. Tidak banyak pula yang membahas THHK secara luas, tulisan mengenai THHK biasanya dalam bentuk penggalan-penggalan dan seputar perannya dalam dunia pendidikan Tionghoa di Indonesia sebagai pendobrak berdirinya sekolah modern pada saat itu. Adapun yang fokus terhadap nasionalisme THHK tetapi itupun hanya terbatas. Sedikit tulisan tentang THHK yang menyinggung mengenai bagaimana organisasi ini mewujudkan nasionalisme Tionghoa di Hindia Belanda beserta dampaknya terhadap kehidupan etnis Tionghoa. Salah satunya ialah jurnal yang ditulis oleh Retnaningtyas berjudul Bibit Nasionalisme di Kalangan Penduduk Tionghoa di Indonesia yang membahas tentang dampak dari reformasi pendidikan dalam menentukan arah nasionalisme masyarakat Tionghoa. Oleh sebab itu, penulis ingin membahas secara lebih komprehensif dan tulisan ini diharapkan dapat menambah serta memperdalam pemahaman mengenai peran serta pengaruh organisasi THHK bagi masyarakat Tionghoa di Batavia, bukan hanya dari bidang pendidikan melainkan juga perannya dalam mewujudkan nasionalisme masyarakat Tionghoa di Batavia.

Wawancara bersama Koo Li Fong¹⁰, ia mengatakan bahwa “THHK luput dari catatan sejarah nasional. Dapat dikatakan hampir tidak ada buku-buku sejarah yang menceritakan keberadaan THHK di Indonesia. Padahal sekolah ini cukup lama berdiri di negeri ini, jika terhitung sampai hari ini hampir 119 tahun”. Hal tersebut merupakan imbas dari adanya kebijakan asimilasi dalam segala bidang. Kebijakan ini dikeluarkan karena adanya kekhawatiran pemerintah akan terlibatnya orang Tionghoa pada peristiwa PKI. Dengan demikian, segala macam bentuk penjonjolan bernuansa Cina dipandang pemerintah sebagai suatu hal yang berpotensi menimbulkan masalah baru bagi *nation building*, sehingga pemerintah perlu memberikan pembatasan-pembatasan terhadap hal-hal yang kiranya akan mengancam *nation building* di Indonesia¹¹. Pada masa Orde Baru segala macam yang berhubungan dengan etnis Tionghoa akan dihilangkan. Oleh sebab itu, literatur mengenai THHK sukar untuk di temukan.

THHK yang hadir sebagai organisasi modern di kalangan Tionghoa dengan perkembangannya yang cukup besar turut mendorong lahirnya organisasi modern di kalangan pribumi. Di lansir dari Kompas.com, Sejarawan Didi Kawartanada menjelaskan bahwa seorang pendiri Boedi Utomo yaitu dokter Wahidin Sudirohusodo¹² mengatakan “organisasi kemasyarakatan Tionghoa memacu orang

¹⁰ Koo Li Fong merupakan seorang pustawan di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa di BSD City, Kecamatan Serpong.

¹¹ Nur Hidayah dan Retno Winarni, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik, Sosial Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Jember dari Zaman Orde Lama sampai Reformasi Pada Tahun 1998-2012” hlm. 24.

¹² Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan pencetus berdirinya Organisasi Boedi Oetomo sekaligus seorang pahlawan nasional yang bergerak di bidang Pendidikan.

Jawa untuk mendirikan organisasinya sendiri” dan pada tahun 1910 pengurus THHK dan Boedi Oetomo sempat mengadakan pertemuan untuk bertukar pengalaman dalam kegiatan organisasi¹³. Pada tahun 1920-an selain Boedi Oetomo, lahir pula organisasi modern lainnya seperti Perhimpunan Indonesia sebagai bibit dari nasionalisme Indonesia. Tahun tersebut juga dapat dikatakan sebagai puncak dari semangat pergerakan nasional Indonesia hingga tercetuslah Sumpah Pemuda pada Oktober 1928.

Rasa cinta yang dimiliki masyarakat Tionghoa terhadap tanah leluhurnya, yaitu Cina Daratan tidak menepis fakta bahwa Nasionalisme Cina memiliki peran dalam sejarah Indonesia. Meskipun berbeda pandangan dengan organisasi pergerakan nasional Indonesia mengenai nasionalisme masing-masing, THHK menjadi penting di bahas karena memiliki tujuan yang sama yaitu melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Keduanya bersama berusaha lepas dari belenggu kolonialisme dengan caranya masing-masing. Maka dapat dikatakan THHK turut andil dalam tercapainya kemerdekaan Indonesia.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penelitian sejarah pada dasarnya dilakukan untuk membangun suatu struktur tertentu yang menunjukkan fenomena tertentu. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pembatasan masalah dalam melakukan penelitian guna menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah dari tujuan dan lebih terarah

¹³ Iwan Santosa, “Sekolah Tionghoa Turut Memicu Kebangkitan Nasionalisme” (Kompas.com, 17 November 2012)

pada titik persoalan yang akan dikembangkan nantinya. Pembatasan masalah dalam penelitian dilakukan secara temporal (waktu) dan spasial (tempat).

Batasan temporal pada penelitian ini adalah tahun 1900 di mana organisasi THHK pertama kali didirikan hingga tahun 1942 saat Jepang mulai menguasai Batavia dan mengubah kebijakan terhadap organisasi nasionalis. Banyak dari para pemimpin organisasi dan tokoh politik Tionghoa ditangkap oleh Jepang. Selain melakukan penangkapan, Pemerintah Jepang membubarkan semua organisasi Tionghoa yang sudah berdiri termasuk THHK. Hal ini membuat segala aktivitas THHK menjadi terhenti. Secara spasial, Batasan yang dipilih berfokus pada kota Batavia dalam pengertian administratif merupakan wilayah Kota Tua Jakarta. Batavia merupakan wilayah di mana THHK dibentuk dan didirikan, yaitu di Jalan Patekoan (sekarang Jalan Perniagaan) dan menjadi pusat dari kegiatan THHK di Indonesia. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengapa THHK dibentuk?
2. Bagaimana peran THHK dalam mewujudkan nasionalisme masyarakat Tionghoa?
3. Bagaimana dampak pembentukan THHK terhadap kehidupan masyarakat Tionghoa di Batavia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas Tionghoa Hwee Koan sebagai organisasi nasionalis Tionghoa pertama serta perannya dalam kehidupan masyarakat Tionghoa, baik tokoh maupun

peranakan khususnya di Batavia. Temuan dari penelitian ini yang berupa fakta baru dapat berguna secara akademik bagi pengembangan wawasan mengenai sejarah sosial dan etnis di Indonesia.

D. Metode dan Bahan Sumber

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-naratif. Metode ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Metodologi sejarah sebagai *science of methods* berarti ilmu yang membicarakan cara, yaitu cara untuk mengetahui peristiwa yang terjadi pada masa lampau¹⁴.

Dalam metodologi sejarah, seorang sejarawan dituntut untuk menguasai metode yang digunakan agar mengetahui peristiwa masa lampau. Metode yang dipakai dalam penelitian sejarah mencakup empat langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Notosusanto dalam Sulasman¹⁵, di antaranya :

1. Heuristik

Tahapan pertama dalam penelitian sejarah adalah pengumpulan data atau sumber sejarah atau yang biasa disebut heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein*, artinya sama dengan *to find* yang berarti tidak hanya menemukan, tetapi mencari dahulu¹⁶. Tahapan heuristik adalah tahapan

¹⁴Sulasman, "Metodologi Penelitian Sejarah" (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm 74.

¹⁵ Ibid, hlm. 75.

¹⁶ Ibid, hlm 93.

menghimpun jejak-jejak masa lampau, atau kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, ataupun nevidensi (bukti) sejarah.

Tahap itu, sumber data yang dikumpulkan dapat berupa data lisan, yaitu semua keterangan yang dituturkan oleh pelaku atau saksi sejarah; data tulisan, yaitu semua keterangan dalam bentuk laporan tertulis; maupun benda atau artefak yang mana keterangan dapat diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Sumber sejarah secara sifat terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber sejarah pertama, yaitu sumber sejarah yang dekat dengan peristiwa sejarah berupa buku yang membahas kehidupan masyarakat etnis Tionghoa peranakan pada awal abad ke 20 dan terkait organisasi Tionghoa khususnya Tiong Hoa Hwee Koan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat dan dokumen terkait di Museum Perpustakaan Peranakan Cina di BSD City, Tangerang Selatan. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber kedua yang menjadi sumber pelengkap yang mana penulis mengakses berbagai artikel atau jurnal ilmiah yang membahas Tiong Hoa Hwee Koan seperti Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Tionghoa di Batavia 1900an-1930an oleh Wildan Sena Utama, Komunitas Tionghoa Dalam Pergerakan Politik Indonesia (1926-1942) oleh Sugiyarto, Bibit Nasionalisme di kalangan Penduduk Tionghoadi Indonesia oleh Retnaningtyas Dwi Hapsari dan lain sebagainya.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah sumber didapatkan pada tahap sebelumnya, temuan tersebut kemudian akan diseleksi mengacu pada prosedur yang ada, tahapan ini disebut verifikasi atau kritik sumber. Bisa dikatakan pula bahwa kritik adalah suatu usaha menganalisa, memisahkan dan mencari suatu sumber untuk memperoleh keabsahan sumber yang dibutuhkan. Oleh karena itu dilakukan penyeleksian apakah data tersebut akurat atau tidak, baik dari segi bentuk maupun isinya sehingga dapat dipertanggungjawabkan¹⁷.

Tahapan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan internal.

Kritik ekstern merupakan cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Kritik ekstern yang digunakan untuk meneliti otentisitas sumber secara bentuk dengan menguji material kertas atau bahan, tahun, dan tanda yang terdapat di dalam teks¹⁸ seperti umur dan asal dokumen, tahun dibuatnya, atas nama siapa, bentuk dan bahan sumber, serta apakah sumber itu asli atau salinan dan masih utuh atau sudah berubah. Pada tahap ini penulis memperhatikan tahun terbit dan pengarang buku yang mana pengarang atau penulis buku itu harus diketahui sebagai orang yang dapat dipercaya (*credibel*) dengan cara melihat biografinya.

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999) hlm 11.

¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tirta Wacana, 2013), hlm 77.

Sedangkan kritik internal menekankan kritik pada aspek isi dari sumber yang di dapat. Penulis akan memahami isi buku dan artikel yang berkaitan dengan cermat apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian tentang Tiong Hoa hwee Koan dalam Dinamika Kehidupan Etnis Tionghoa di Indonesia. Penulis juga membandingkan isi dari masing-masing sumber yang telah ditemukan. Fakta bahwa THHK berperan penting dalam perkembangan nasionalisme Tionghoa di Indonesia dalam buku Sukarno & Tionghoa Indonesia dan penulis menemukan fakta yang sama di buku Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia karya Leo Suryadinata.

3. Interpretasi

Setelah melalui dua tahapan sebelumnya yaitu heuristik dan kritik, tahapan selanjutnya adalah interpretasi. Menurut Kuntowijoyo interpretasi ini dibagi menjadi dua; analisis berarti menguraikandan sintesis berarti menyatukan¹⁹. Pada tahap ini diperlukansuatu ketelitian dan kecermatan sehingga fakta-fakta sejarah dapat ditafsirkan dengan baik tanpa menjerus pada kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Peneliti pada tahap ini menggabungkan data-data yang telah ditemukan baik dari sumber primer maupun sumber sekunder untuk dirangkai dan diolah menjadi satu kesatuan fakta sejarah.

4. Historiografi

Historiografi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *historia* dan *grafein*. *Historia* berarti penyelidikan tentang gejala alam fisik (*physical research*) sedangkan *grafein* berarti gambaran, lukisan, tulisan atau uraian. Historiografi adalah proses penyusunan fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah. Pada tahap penulisan (historiografi) penelitiannya jika laporan hasil peneliti dari awal hingga akhir, yang meliputi masalah-masalah yang harus dijawab. Penyajian historiografi meliputi (1) pengantar (2) hasil penelitian dan (3) simpulan²⁰. Dalam tahapan yang terakhir ini penulis mencoba mengaitkan fakta, data dan hasil interpretasi yang akan penulis susun untuk menjadi tulisan.

²⁰ Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012) hlm. 79.